e-ISSN 2798-0502

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan Vol: 6, No 2, 2025, Page: 1-10

Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan *Value Of Money* Di Kabupaten Dairi Pada Tahun 2023 Dan 2024

Khairani Matondang*, Aqilah Apritia Parawanza, Jemelly Prisya Simanjuntak, Yolanda Tampubolon

Universitas Negeri Medan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja sektor publik di Kabupaten Dairi dengan menggunakan metode value of money. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dimana data tersebut diperoleh dari artikel, dokumen dan jurnal terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis kriteria ekonomi tahun 2023 termasuk dalam kriteria ekonomis karena rasio yang diperoleh lebih dari 100% sedangkan tahun 2024 termasuk dalam kriteria tidak ekonomis karena hasil rasionya kurang dari 100%, efisiensi tahun 2023 termasuk dalam kriteria tidak efisien karena rasio yang diperoleh lebih dari 100% sedangkan tahun 2024 termasuk dalam kriteria efisien karena rasio yang diperoleh kurang dari 100%, dan kriteria tahun 2023 dan 2024 termasuk dalam kriteria yang sama yaitu efektif karena rasio yang diperoleh keduanya kurang dari 100%.

Kata Kunci: Nilai Uang, Ekonomis, Efektif, Efisien

DOI: https://doi.org/10.53697/emak.v6i2.2378
*Correspondence: Khairani Matondang
Email: alawiyah@unimed.ac.id

Received: 23-02-2025
Accepted: 23-03-2025
Published: 23-04-2025

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *This study aims to measure the performance of the public sector in Dairi Regency using the value of money method. The data sources used are secondary data where the data is obtained from articles, documents and related journals. The analysis used in this study is qualitative and quantitative analysis. The results of the economic criteria analysis in 2023 are included in the economic criteria because the ratio obtained is more than 100% while 2024 is included in the uneconomical criteria because the ratio results are less than 100%, efficiency efficiency in 2023 is included in the inefficient criteria because the ratio obtained is more than 100% while in 2024 it is included in the efficient criteria because the ratio obtained is less than 100%, and the criteria for 2023 and 2024 are included in the same criteria, namely effective because the ratio obtained by both is less than 100%.*

Keywords: *Value of money, Economical, Effectiveness, Efficient*

Pendahuluan

Dalam era globalisasi saat ini, kinerja sektor publik di indonesia mengalami perkembangan yang membaik karena didukung oleh hal- hal konkret seperti pengaruh teknologi dan kesadaran masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi, pemerintah memanfaatkannya dalam kinerja sektor publik. Pengaruh perkembangan teknologi yang pesat di era globalisasi saat ini mengakibatkan meningkatnya efesiensi dan efektifitas dalam kinerja sektor publik. Misalnya mempersingkat waktu dalam hal administratif yang membutuhkan waktu pengerjaan yang lama. Selain itu dapat meningkatkan keamanan data dan data akuntabilitas sehingga data tidak mudah hilang atau

dipergunakan dengan sembarangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga keamanan data lebih terjamin misalnya seperti adanya *e-ktp* yang lebih efisien karena berupa *barcode* dan mengurangi adanya penyalahgunaan ktp berupa penggandaan kartu langsung dan kehilangan kartu ktp. Perkembangan teknologi juga mempermudah akses masyarakat dalam layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah misalnya masyarakat membuat aplikasi mobile jkn untuk mendaftar layanan kesehatan ke puskesmas ataupun rumah sakit secara *online*. Perkembangan teknologi juga dapat mempermudah pemerintah dalam membuat keputusan karena adanya data yang lebih akurat karena perkembangan teknologi yang makin pesat. Oleh karena itu, pemerintah lebih memahami kebutuhan dari masyarakat dalam layanan publik. Dari perkembangan terknologi tersebut diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menggunakan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Pemerintah memiliki tugas pokok dalam melayani masyarakat. Dalam melayani masyakat pemerintah menggunakan dana APBN dan APBD yang diperoleh dari pajak yang telah dibayar oleh masyarakat. Pemerintah perlu menyadari dalam kinerja publik yang diselenggarakan oleh pemerintah masyarakat harus dapat melihat anggaran yang digunakan oleh pemerintah sudah tepat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan ekonomis, efisien dan efektif. Salah satu alat pengendali untuk mengetahui kinerja dari pelaksana anggaran pemerintah dapat digunaka menggunakan skema alat ukur yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan memfokuskan pada prinsip *Value For Money* (*VFM*), kinerja pelaksanaan anggaran yang direalisasikan ini untuk mengukur belanja pemerintah. Ringkasnya mencakup ekonomi, efisiensi dan efektivitas serta kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

Kabupaten Dairi adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Dairi berpotensi dalam peningkatan pembangunan ekonomi daerah. Tetapi, Kabupaten Dairi harus dapat menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran daerah, jika terjadi kekurangan dalam kinerja dalam pengelolaan anggaran daerah maka akan terjadi dampak yang besar terhadap masyarakat dari bidang ekonomi, dan juga kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pentingnya pengukuran kinerja sektor publik yang tranparan dan akuntabel untuk pengelolaan dana anggaran daerah. Pendekatan *value of money* merupakan pendekatan yang relevan untuk mengetahui dan memastikan bahwa anggaran daeerah yang digunakan pemerintah sudah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masayarakat sehingga masyarakat menerima manfaat yang telah diberikan pemerintah didalam memaksimalkan anggaran dana dengan baik dan tepat sasaran.

Tabel 1. Laporan anggaran dan realisasi pendapatan daerah Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2023	1.017.406.292.290	229.440.034.333	1.072.100.727.255	1.420.604.212.054
2024	1.220.993.026.000	1.191.999.279.399	1.276.479.070.000	1.195.095.993.041

Sumber : Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten Dairi

Berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa anggaran pendapatan 2023 lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pendapatannya sedangkan anggaran pendapatan 2024 lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatannya. Pada tahun 2023 pendapaan anggaran sebesar Rp.107.406.292.290 namun yang terealisasi sebesar Rp.229.440.034.333 hal tersebut disebabkan karena pemerintah mengeluarkan dana yang lebih dari anggaran yang ada terhadap pembangunan aset daerah. Pada tahun 2024 pendapatan anggaran sebesar Rp.1.220.993.026.000 dan yang terealisasikan sebesar Rp.1.191.999.279.399 hal tersebut disebabkan karena sebagian anggaran tidak terealisasikan oleh pemerintah dan sisa anggaran tersebut disimpan untuk menambah anggaran pendapatan pada tahun selanjutnya.

Belanja daerah pada tahun 2023 dan 2024 juga berbeda yang dimana di tahun 2023 anggaran belanja pemerintah lebih kecil dibandingkan yang terealisasi sedangkan pada tahun 2024 anggaran belanja pemerintah lebih besar dibandingkan yang terealisaasi. Pada tahun 2023 anggaran belanja pemerintah sebesar Rp.1.072.100.727.255 yang terealisasi sebesar Rp.1.420.604.212.054 hal tersebut menunjukan bahwa belanja pemerintah yang tidak sesuai dengan anggaran yang ada sehingga menyebabkan utang terhadap belanja pemerintah namun pada tahun 2024 anggaran belanja pemerintah sebesar Rp.1.276.479.070.000 yang terealisasi sebesar Rp.1.195.095.993.041 hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan dana yang berlebihan sehingga terjadi pemborosan keuangan karena adanya pembelian barang dan juga jasa yang melebihi kebutuhan yang ada.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi

Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktifitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan (Horngren dan Horrison, 2017:4).

Kinerja Sektor Publik

Kinerja merupakan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara, 2022). Pengukuran kinerja merupakan proses mencata dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*)

melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses (Larry D Stout dalam Tondi Sollon, 2013). Menurut Handayani (2011) berpendapat bahwa pengukuran kinerja merupakan usaha memetakan strategi ke dalam tindakan pencapaian target tertentu, tidak hanya target akhir yang perlu diukur dan menjadi ukuran kinerja perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kompetensi dan proses yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan organisasi publik dengan menggunakan indikator tertentu, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif (Mahmudi, 2019).

Value Of Money

Value of money adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value of money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektifitas suatu kegiatan, program, dan organisasi (Mahmudi, 2015). *Value of money* merupakan metode yang selalu digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik karena dana yang digunakan oleh pemerintah tertata dengan baik menggunakan pendekatan ini. Melalui *value of money* masyarakat juga dapat melihat bagaimana dana dialokasikan oleh pemerintah dan juga melihat hasil nyata dari kebijakan pemerintah tersebut.

Value of money memiliki 3 konsep utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas

1. Ekonomi

Tingkat ekonomi sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegitan atau memperoleh sesuatu yang berhubungan dengan biaya operasional. Tingkat ekonomis suatu anggaran dapat dilihat dari persentase tingkat pencapaian. Sedangkan dalam mengukur tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan dilihat dengan membandingkan antara anggaran belanja dan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Ekonomi} = \frac{input\ (\ realisasi\ belanja\ )}{harga\ input\ (anggaran\ belanja\ )} \text{ x } 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan

Rasio Ekonomi	Kriteria Ekonomi
X>100%	Ekonomis
X=100%	Seimbang
X<100%	Tidak Ekonomis

Jika hasil yang diperoleh kurang dari 100% (x<100%) maka kriteria keuangannya termasuk ekonomis, jika nilai yang diperoleh sama dengan 100% (x=100%) maka kriteria keuangannya termasuk perekonomian seimbang dan jika nilai yang diperoleh lebih dari 100% (x>100%) maka kriteria keuangannya termasuk tidak ekonomis.

2. Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan metode operasional.proses dikatakan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya yang serendah-rendahnya. Efisiensi disini merupakan perbandingan antara *input* dengan *output*. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keungan dilakukan perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi belanja. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah.

$$\text{Efisiensi} = \frac{output(realisasi\ belanja\ )}{input\ (\ anggaran\ pendapatan\ )} \text{ x } 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
X>100%	Tidak Efisien
X=100%	Efisien Seimbang
X<100%	Efisien

Jika hasil yang diperoleh kurang dari 100% (x<100%) maka kriteria keuangannya termasuk tidak efisien, jika hasil yang diperoleh sama dengan 100% (x=100%) maka kriteria keungannya termasuk efisien seimbang, dan jika hasil yang diperoleh lebih dari 100% (x>100%) maka kriteria keuangannya temasuk efisien.

3. Efektifitas

Efektifitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektifitas yaitu perbandingan antara outcome yaitu dampak dari suatu program terhadap masyarakat dengan output yaitu hasil yang dicapai dari suatau program aktifitas daan kebijakan.

$$\text{Efektifitas} + \frac{hasil(pendapatan\ realisasi\ )}{output(pendapatan\ belanja)} \text{x } 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

Rasio Efektifitas	Kriteria Efektifitas
X>100%	Tidak Efektif
X=100%	Seimang yang Efektif
X<100%	Efektif

Jika hasil yang diperoleh kurang dari 100% (x<100%) maka kriteria keungannya termasuk tidak efektif, jika hasil yang diperoleh sama dengan 100% (x=100%) maka kriteria keuangannya termasuk seimbang yang efektif, dan jika hasil yang diperoleh lebih dari 100% (x>100%) maka kriteria keuangannya termasuk efektif.

Metodologi

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada apbn kabupaten dairi untuk mengamati pengukuran kinerja sektor publik menggunakan metode *value of money* di kabupaten dairi pada tahun 2023 dan 2024.

2. Jenis data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa bukti dan catatan yang tersusun dan dipublikasikan.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan Pada Apbd Kabupaten Dairi periode 2023 dan 2024.

4. Metode Analisis Data

Analisis Kualitatif

Penelitian kualititatif yaitu penelitian yang memanfaatkan data berupa penjelasan berupa kata-kata yang diambil melalui analisis dokumen yang ada. Dalam penelitian tentang analisis pengukuran kinerja organisasi sektor publik dengan menggunakan pendekatan value of money di Kabupaten Dairi pada tahun 2023 dan 2024 peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan hasil dari rasio ekonomi, efesiensi dan efektifitas dari apbn Kabupaten Dairi pada tahun 2023 dan 2024.

Analisis Kuantitatif

Penelitian kuantitatif yaitu analisis yang menekankan pada pengujian teoriteori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. dalam penelitian tentang analisis pengukuran kinerja organisasi sektor publik dengan menggunakan pendekatan *value of money* di Kabupaten Dairi pada tahun 2023 dan 2024 peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan menghitung dan menjelaskan hasil dari perhitungan kinerja dengan menggunakan *value of money* dengan menggunakan indikator ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 4. Hasil perhitungan mengenai tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi tahun 2023 dan 2024

Tahun	Rasio Ekonomi		Rasio Efesiensi		Rasio Efektifitas	
	Persen	Kriteria	Persen	Kriteria	Persen	Kriteria
2023	132,5%	Ekonomis	139,62%	Tidak Efisien	21,4%	Efektif
2024	93,6%	Tidak Ekonomis	97,87%	Efisien	93,38%	Efektif

Sumber : Data Olahan,2024

Dalam mewujudkan penerapan ekonomi, efesiensi dan efektifitas dalam kinerja sektor publik, akuntansi sektor publik memiliki peran yang penting dengan menggunakan pengukuran secara *value of money. Value of money* merupakan salah satu pengukuran dalam kinerja sektor publik yang mengukur dana anggaran dan realisasi dari pendapatan dan juga belanja daerah untuk mengukur seberapa ekonomis,efisien dan efektifitas dalam kinerja sektor publik.

Berdasarkan hasil perhitungan persentase pada tabel 3.1 dalam rasio ekonomi tahun 2023 dan 2024 memiliki kriteria yang berbeda yang dimana pada tahun 2023 termasuk dalam kriteria ekonomis sedangkan pada tahun 2024 termasuk dalam kriteria tidak ekonomis. Pada tahun 2023 menunjukkan kriteria yang baik karena kinerja yang baik dari pemerintah karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran dengan tepat dalam melakukan operasional dalam kinerja sektor publik namun pada tahun 2024 pemerintah tidak tepat dalam menggunakan anggaran dalam operasional untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan persentase pada tabel 3.1 dalam rasio efisiensi pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga berbeda. Pada tahun 2023 termasuk kedalam kriteria tidak efisien sedangkan pada tahun 2024 termasuk ke dalam kriteria efisien. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dari pemerintah dalam menggunakan dana. Pada tahun 2024 pemerintah dapat menggunakan dana seminimum mungkin sehingga terciptanya efisiensi dalam penggunaan daerah.

Berdasarkan hasil persentase pada tabel 3.1 dalam rasio efektifitas dalam kinerja sektor publik menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dan tahun 2024 memiliki kriteria yang sama yaitu termasuk ke dalam kriteria efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah dapat mengetahui yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah telah memberikan pelayanan yang tepat sehingga terciptanya efektifitas dalam kinerja pemerintah.

Simpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari tabel 3.1 realisasi program yang diukur dengan tingkat ekonomis pada tahun 2023 dan 2024 memiliki kriteria yang berbeda. Tahun 2023 rasio ekonomi termasuk kriteria ekonomis karena rasio ekonominya lebih dari 100% yaitu 132,5% sedangkan tahun 2024 rasio ekonomi termasuk tidak ekonomis karena rasio ekonominya kurang dari 100% yaitu 93,4%. dari data tersebut diketahui bahwa kriteria ekonomis pada tahun 2023 memiliki kinerja yang baik dalam ekonomis dibandingkan pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari tabel 3.1 realisasi program yang diukur deengan tingkat efisiensi pada tahun 2023 dan 2024 memiliki kriteria yang berbeda. Tahun 2023 rasio efisiensi termasuk kriteria tidak efisien karena rasio efisiensinya lebih dari 100% yaitu 139,62% sedangkan padatahun 2024 rasio efisiensi termasuk efisien karena rasio efisiensinya kurang dari 100% yaitu 97,87% dari data tersebut diketahui bahwa kriteria efisiensi pada tahun 2024 memiliki kinerja yang baik dalam efisiensi dibandingkan pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil rekaitulasi dari tabel 3.1 realisasi program yang diukur dengan tingkat efektifitas pada tahun 2023 dan 2024 memiliki kriteria yang sama yaitu termasuk dalam kriteria yanng efektif karena kurang dari 100%. Pada tahun 2023 rasio efektifitasnya yaitu 21,4% dan pada tahun 2024 yaitu 93,38%. dari data tersebut diketahui bahwa kriteria efektifitas pada tahun 2023 dan 2024 memiliki kinerja yang baik.

Daftar Pustaka

Akrama, S. M., Sukirman, A. S., & Yusrianti, E. (2023). Pengukuran Kinerja Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 1–10.

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Dairi (2025). Anggaran Pendapatan pada APBD Kabupaten Dairi

Ekayana, I. P., & Wirantari, I. D. A. P. (2024). Evaluasi Pengukuran Kinerja Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Konsep *Value for Money*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 38–50.

Esislahyenti, E., Mursalini, W. I., & Indrawati, N. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan *Value For Money* (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kabupaten Solok). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26454–26465.

Fitriyanti, D. S. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Prinsip *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016–2020. Skripsi, Universitas Bangka Belitung.

Hadaryen, Y. A., & Sugiartono, E. (2021). Evaluasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Desa dengan Menggunakan Konsep *Value for Money*: Studi Kasus pada Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 1(2), 134–140.

Hakiki, R. M. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 15(2), 1–23.

Hawala, L. W., & Putri, C. M. (2023). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip *Value for Money* pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat. *AKSIOMA: Jurnal Manajemen*, 2(1), 45–58.

Kariyoto, K. (2023). Implementasi *Value For Money*, Input Output Outcome dan Best Value Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 11(1), 1–10.

Mumpuni, D. P. S., & Widajantie, T. D. (2023). Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Pendekatan *Value for Money* Studi Kasus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 60–75.

Nolasari, M., Maria, M., & Nurhasanah, N. (2023). Realisasi Belanja dengan Pendekatan *Value for Money* pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Palembang. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 501–511.

Oktavianty, N., Desyana, G., & Kurniawan, R. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Menggunakan Konsep *Value for Money*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(1), 45–60.

Permata Sukma, I., & Muslihat, A. (2023). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Dengan Menggunakan Metode *Value For Money*. *AKUNTANSI 45*, 4(2), 374–383.

Prasetia, D., Saladin, H., & Nurmala, N. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value for Money* pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Kayuagung (OKI). *ECo-Fin*, 6(2), 441–451.

Prasetyo, A., Dewi, R. R., & Masitoh, E. (2022). Analisis Kinerja Berdasarkan Konsep *Value for Money* pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Penumping Kota Surakarta. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 10(1), 25–38.

Pratama, A., Sam, I., & Erwati, M. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Jambi Berdasarkan Konsep *Value for Money*. *Jambi Accounting Review*, 1(2), 45–58.

Pratama, V. Y., Syamsuddin, & Difa, F. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep *Value for Money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 149–155.

Prisila, P., Hardiyanto, A. T., & Wibowo, S. (2023). Analisis Efektivitas Kinerja Dengan *Value For Money* Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor. *Repository Universitas Pakuan*.

Putri, T. Y., & Nasution, A. I. (2022). Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Pendekatan *Time Value of Money*: Studi Kasus Badan Pusat Statistika Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4(1), 77–82.

Ramadani, A. D. E., Sari, E. N., & Gantino, R. (2023). Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan *Value for Money* pada Pemerintahan Kota Medan. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(1).

Ramlah, S., Irmawati, I., Gustiningsih, D. A., & Suriani, S. (2024). Analisis *Value For Money* pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kota Makassar. *Tangible Journal*, 9(2), 306–314.

Rhomadiningsih, D. (2024). *Value for Money* dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 6(3), 288–303.

Saraswati, N. P. A., & Suhartini, D. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money*: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 45–58.

Sari, G. Y. N., Nanda, S. T., Apriliyani, I. B., & Zenita, R. (2023). Analisis *Value for Money* pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 50–65.

Sari, N. P., & Hadiprajitno, P. T. B. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–7.

Sholikhah, I. M., & Khoiriawati, N. (2023). Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dengan Menggunakan Analisis *Value for Money*. *Budgeting: Journal of Business, Management and Accounting*, 4(1), 30–45.

Silaban, A. N., Lismono, T. T., & Silaen, E. (2023). Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Menggunakan Metode *Value For Money* pada Pemprov DKI Jakarta. *Media Ekonomi dan Bisnis*, 14(1).

Suridiyanti, W. A., Haliah, H., & Nurleni, N. (2023). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip *Value for Money* Periode Tahun 2019–2021. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 5(2), 75–88.

Syahbudi, M., & Saragih, R. F. (2023). Evaluasi Kinerja Ekonomi Keuangan Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 3(2), 119–133.

Tinambunan, R. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan *Value For Money* di Desa Sitio-Tio Hilir Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 5(1), 60–70.

Wahiji, T. R. M., Karamoy, H., & Kapojos, P. M. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dengan Menggunakan Pendekatan *Value for Money* pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*.

Widad, N. N. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan *Value for Money* (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan). Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Wulandari, R., Iskandar, S., & Fausiah, F. (2023). Analisis Pengukuran Kinerja Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Dinas Pariwisata Kota Makassar Periode 2020–2022. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 80–99.

Yanto, Y. (2023). Analisis Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 13(1), 75–89.

Yuliyanto, W., Wahyuningsih, S., Kurniasih, R., & Waluyo, A. (2023). Pengukuran Kinerja melalui Pendekatan *Value for Money* pada Pelaksanaan Anggaran Dinas X di Sektor Publik. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 233–245.